



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP TAHUN 2024

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KATA PENGANTAR

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan administrasi selama Tahun Anggaran 2024 baik kegiatan rutin maupun kegiatan fisik yang dana kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib dituangkan ke dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai turunan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang utuh dan memiliki dua fungsi utama, yaitu :

1. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan untuk menyiapkan pertanggung jawaban kinerja kepada Gubernur Sumatera Selatan;
2. Laporan Kinerja merupakan bahan untuk saran evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini secara garis besar berisikan informasi mengenai target dan capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama Tahun Anggaran 2024 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024. Pencapaian sasaran kinerja, merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selain dimanfaatkan untuk perbaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya untuk pemenuhan visi dan misi yang telah digariskan di dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dan juga unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pekerjaan Umum Keciptakarya, wajib menyampaikan LKjIP secara teratur, jelas dan tepat waktu. Format penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir Kata, kami mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Januari 2025

**Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan**



Ir. H. Novian Aswardani, ST., M.M., IPM., ASEAN.Eng

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197511251999031004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar/Grafik.....	vii
Daftar Lampiran	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.....	1
1.3 Susunan dan Struktur Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.....	2
II. PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Telaahan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Kepala Daerah Sumatera Selatan.....	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.....	7
2.3 Pohon Kinerja.....	10
2.4 Perjanjian Kinerja.....	10
III. AKUNTABILITAS KERJA.....	14
A. Capaian Kinerja.....	14
1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	15
2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	17
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026	37
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Standar Nasional	37

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternative Solusi.....	38
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	43
B. Realisasi Anggaran.....	48
IV. PENUTUP.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Klasifikasi Berdasarkan Unit Kerja	3
1.2 Klasifikasi Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang).....	3
1.3 Klasifikasi Berdasarkan Esselon.....	3
1.4 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
1.5 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Tenaga Kerja Sukarela.....	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.....	8
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	11
2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	12
2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	13
3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja	14
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	15
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	16
3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	37
3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional.....	37
3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	39
3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	40
3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran....	41
3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan.....	41

3.10	Persentase Efisiensi Biaya Program yang Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2023..	42
3.11	Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	49
3.12	Realisasi Keuangan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	50

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

Grafik	Hal
3.1 Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2024.....	17
3.2 Perbandingan Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2023 dan tahun 2024	17
3.3. Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024	18
3.4 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	18
3.5 Kondisi Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak RPD 2024-2026 Provinsi Sumatera Selatan	20
3.6 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2024.....	21
3.7 Perbandingan Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024	22
3.8 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	22
3.9 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024	23
3.10 Kondisi Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak RPD 2024-2026 Provinsi Sumatera Selatan	24
3.11 Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani Tahun 2024	25
3.12 Perbandingan Target Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani Tahun 2023 dan Tahun 2024	26
3.13 Perbandingan Realisasi Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	26
3.14 Kinerja Realisasi Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani RPD 2024-2026 Provinsi Sumatera Selatan.....	27
3.15 Perbandingan Capaian Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani Tahun 2023 dan Tahun 2024	27

3.16 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Tahun 2024	28
3.17 Perbandingan Target Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Tahun 2023 dan Tahun 2024	28
3.18 Perbandingan Realisasi Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Tahun 2023 dan Tahun 2024	29
3.19 Perbandingan Capaian Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	29
3.20 Kondisi Kinerja Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani RPD 2024-2026.....	30
3.21 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada Tahun 2024.....	31
3.22 Perbandingan Target Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	31
3.23 Perbandingan Realisasi Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	32
3.24 Perbandingan Capaian Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	33
3.25 Perbandingan Capaian Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	33
3.26 Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2024.....	34
3.27 Perbandingan Target Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	34
3.28 Perbandingan Realisasi Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	35
3.29 Perbandingan Capaian Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	35
3.30 Kinerja Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Pada Akhir RPD 2024-2026 Provinsi Sumatera Selatan.....	36

Gambar

3.1	Foto Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Kab. OKI.....	19
3.2	Foto Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Kab. OKUT.....	19
3.3	Foto Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Kab. OKUT.....	20
3.4	Foto Kegiatan Pembangunan Drainase Kota Muara Dua Kab. Oku Selatan	25
3.5	Foto Kegiatan Indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	30
3.6	Foto Kegiatan Indikator Persentase Satuan Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pohon Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
- Lampiran 2 : Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat pada Pasal 28 H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Negara Indonesia secara umum dan Pemerintah Indonesia secara khusus untuk mengutamakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, prasarana, dan utilitas umum sebagai penunjang kehidupan masyarakat dalam rangka mensejahterakan hidup masyarakat.

Dalam penyelenggaraan program tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemegang hak otonomi daerah di Indonesia berupaya menjalankan amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan mempertimbangkan azas yang terdapat di dalamnya, salah satunya adalah azas akuntabilitas. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi pada urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan keciptakaryaan. Sebagai landasan formal dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang didasarkan pada azas-azas umum pemerintahan yang baik serta merupakan pelaksanaan dari penerapan azas akuntabilitas, maka diupayakan untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Substansi dari sistem AKIP yang harus diupayakan untuk dibangun atau dikembangkan adalah melalui penyusunan dan pelaksanaan perencanaan strategis, pengukuran dan evaluasi kinerja yang terukur serta pelaporannya. Sebagai bentuk pelaksanaan azas akuntabilitas tersebut, dibuatlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2021 yang mengacu kepada Permenpan No. 53 Tahun 2014.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2) Fungsi

Adapun Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan perumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, tata bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi, dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur,
- b. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang perumahan dan kawasan permukiman,
- c. Pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota,
- d. Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air,
- e. Penyelenggaraan penyediaan dukungan atau bantuan untuk kerja sama antar kabupaten atau kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman,
- f. Pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program,
- g. Penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi,
- h. Penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat di bidang bina jasa konstruksi,
- i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan barang milik negara/daerah,
- j. Pembinaan administrasi, kepegawaian, dan unit pelaksanaan teknis,
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 Susunan dan Struktur Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berjumlah **101 (seratus satu)** orang Aparatur Sipil Negara dan 89 (**delapan puluh sembilan**) orang Tenaga Kerja Sukarela yang diklasifikasikan berdasarkan unit kerja, pangkat (golongan/ruang), eselon, dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 1.3, dan Tabel 1.4.

a. Jumlah Aparatur Sipil Negera Berdasarkan Unit Kerja

Tabel 1.3 Klasifikasi Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Laki - Laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	P3K	ASN	P3K	
1	Sekretariat	13	-	9	-	22
2	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	13	-	5	-	18
3	Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	10	-	4	-	14
4	Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	9	-	9	-	18
5	UPTD PIP2B & Jasa Konstruksi	5	1	4	1	11
6	Bidang Perumahan	11		7		18
Jumlah		61	1	38	1	101

b. Jumlah Aparatur Sipil Negera Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

Tabel 1.1 Klasifikasi Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

No	Golongan	Laki - Laki				Perempuan				Jumlah (Orang)
		A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Golongan IV	7	2	3	-	5	-	-	-	17
2	Golongan III	11	6	9	18	9	9	6	10	78
3	Golongan II	-	-	2	1	-	-	-	1	4
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	PPPK	1				1				2
	Jumlah	60				41				101

c. Jumlah Aparatur Sipil Negera Berdasarkan Esselon

Tabel 1.2 Klasifikasi Berdasarkan Esselon

No.	Esselonering	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1	-	1
2.	Esselon III	3	1	4
3.	Esselon IV	13	5	18
	Jumlah	17	6	23

d. Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4 Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

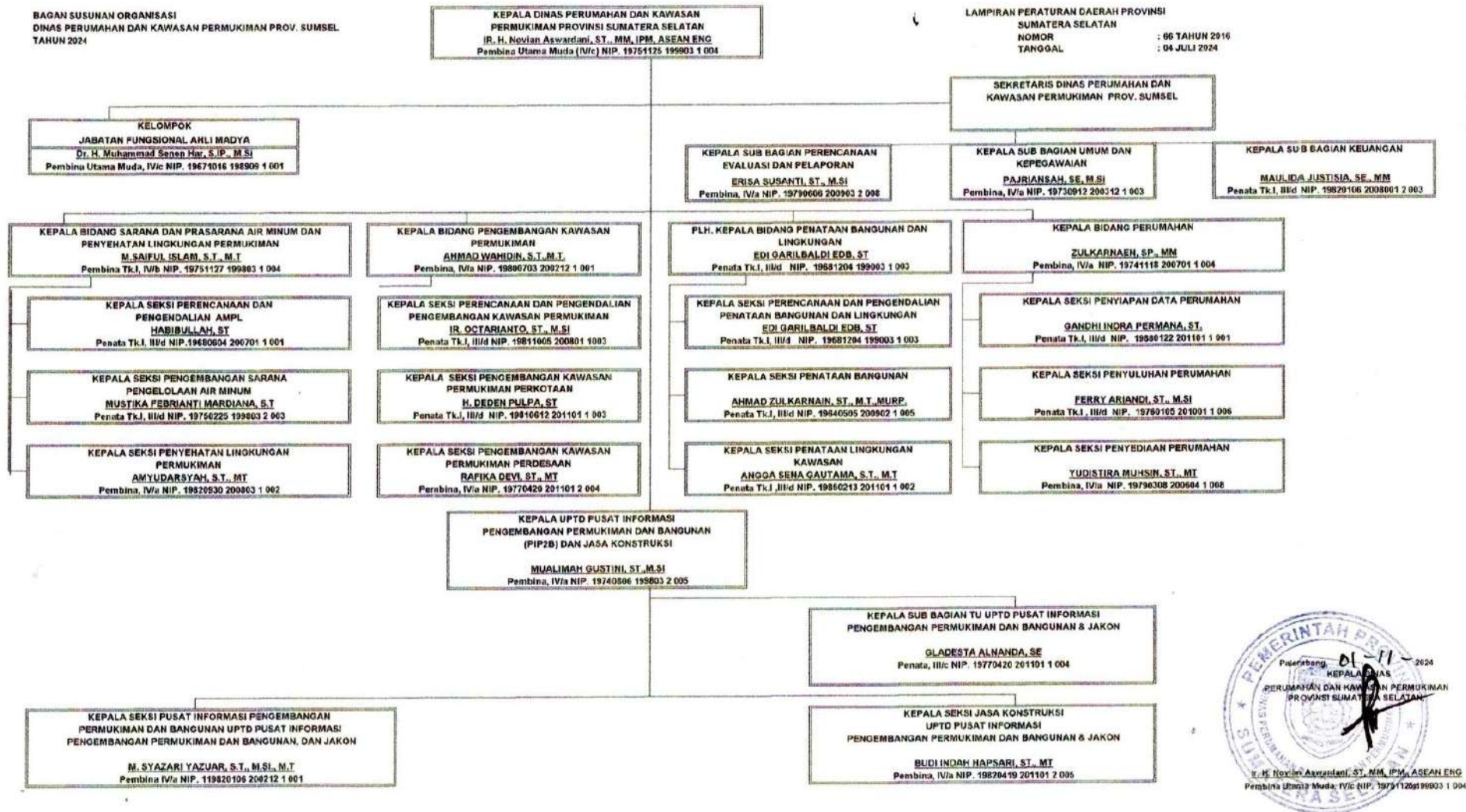
No	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	P3K	ASN	P3K	
1	S3	1	-	-	-	1
2	S2	17	-	9	-	26
3	S1	37	1	26	1	65
4	D4	-	-	-	-	0
5	D3	4	-	1	-	5
6	SMA	4	-	-	-	4
	Jumlah	63	1	36	1	101

e. Jumlah Tenaga Kerja Sukarela Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.5 Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Tenaga Kerja Sukarela

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S3	-
2	S2	4
3	S1	58
4	D4	5
5	D3	6
6	D1	-
7	SLTA Sederajat	14
8	SLTP Sederajat	-
9	SD	-
10	SMK	2
	Total	89

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Telaahan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Kepala Daerah Sumatera Selatan

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2024 – 2026.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap. Fokus/Tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Agenda Pembangunan Tahun I (2024)

Pembangunan tahun 2024 ini memiliki fokus pembangunan pada pembangunan ekonomi masyarakat yang didukung dengan Reformasi Birokrasi maka pada tahun ini tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu, **"Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan"**.

Pada tahun 2024 pembangunan ekonomi masyarakat yang akan terus dibangun hingga merata ke seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas SDM juga dilakukan agar SDM terutama peningkatan kualitas skill tenaga kerja, diharapkan mampu meningkatkan kualitas daya saing pekerja, dan mampu bekerja disektor yang berpotensi dengan pendapatan tinggi.

2. Agenda Pembangunan Tahun II (2025)

Pembangunan Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan akan berfokus pada beberapa sektor yaitu ekonomi, infrastruktur dan sosial, dengan tema pembangunan, **"Penguatan Daya saing daerah menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan"**. Sesuai dengan fokus dan tema pembangunan tahun 2025, dengan memperhatikan potensi unggulan daerah terutama dalam pengelolaan SDA harus didukung dengan SDM yang unggul, perekonomian daerah yang tumbuh dengan pesat, dengan dukungan infrastruktur yang mumpuni dan pelayanan pemerintah yang handal.

3. Agenda Pembangunan Tahun III (2026)

Pada tahun ini mengusung tema pembangunan, "**Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan**". Merujuk tema pembangunan ini, Provinsi Sumatera Selatan akan berupaya untuk menyempurnakan dan memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bagi masyarakat. Pembangunan akan dilaksanakan dengan menitikberatkan pembangunan yang merata diseluruh bidang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategisnya dengan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tersebut.

2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun periode 2019-2023, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yaitu penjabaran dari arah kebijakan Gubernur Sumatera Selatan, dengan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Meningkatnya Akses Terhadap Infrastruktur Dasar, serta memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman;
2. Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana;
3. Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum;
4. Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan;
5. Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis.

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1,1 Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1.1.1	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	11,21 %	11,43 %
			1.1.2	Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	34,02 %	36,10 %
		2,1 Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	2.1.1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	82%	83%
	Meningkatnya Akses Terhadap Infrastruktur Dasar	3,1 Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	3.1.1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	88,35%	89,35%
		4,1 Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	4.1.1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak	80,62%	81,62%
		5,1 Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	5.1.1	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	31%	33%

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan tidak lepas dari kondisi nyata capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun sebelumnya yaitu Rencana Strategis periode 2019-2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan berbagai kemajuan yang berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang dapat bermuara pada capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akses Terhadap Infrastruktur Dasar	1,1 Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1.1.1 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	%	11,21 %
			1.1.2 Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	%	34,02 %
			Persentase Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%	1%
		2,1 Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	2.1.1 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	82%
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	82%
		3,1 Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	3.1.1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	88,35%
			3.1.2 Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	1%
			Persentase dokumen air minum regional yang tersusun	%	12,5%
		4,1 Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	4.1.1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak	%	80,62%
			4.1.2 Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	%	1%
			4.1.3 Persentase Kabupaten/Kota yang Mengoperasionalkan IPLT	%	58,82%
			Persentase dokumen sanitasi regional yang tersusun	%	12,5%
			Persentase Drainase Kewenangan Provinsi yang Dibangun	%	33,33%
			Persentase dokumen pendukung pembangunan infrastruktur drainase regional dan daerah strategis provinsi yang tersusun	%	16,67%
			Persentase dokumen pendukung pembangunan infrastruktur persampahan regional yang tersusun	%	20%

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
		5,1 Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	5.1.1	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	%	31%
			5.1.2	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang tertangani	%	31%
		6,1 Meningkatnya kuantitas/kualitas tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang berstandar teknis	6.1.1	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	0,46%
		7,1 Meningkatnya Jumlah Pengembang Perumahan yang Tersertifikasi	7.1.1	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah di Wilayah Provinsi yang Tersertifikasi	%	1%
		8,1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penatausahaan	8.1.1	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%
				Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Permukiman dan Bangunan yang Terpublikasi	%	80%

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak tertanggulangi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan harus diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya.

2.3 Pohon Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada pohon kinerja yang menjelaskan tentang kerangka acuan kerja. Pohon kinerja tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.4 Perjanjian Kinerja

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan target kinerja berupa kesepakatan dalam pencapaian target tahun 2024. Target kinerja tersebut digunakan sebagai ruang lingkup tugas pelaksanaan program dan kegiatan dari pimpinan instansi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yang disertai dengan indikator kinerja. Target kinerja tahun 2024 itu dituangkan didalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Indikator Kinerja dan Program Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	1.1	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	11,21
		1.2	Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	%	34,02
2	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	2.1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	82
3	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	3.1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	88,35
4	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	4.1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	80,62
5	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	5.1	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	%	31

Tabel 2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 35.181.547.240
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	82%	Rp 996.745.985
		Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	82%	
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	11,21%	Rp 12.692.606.707
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	34,02%	Rp 60.977.189.435
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah di Wilayah Provinsi yang Tersertifikasi	1%	Rp 203.796.000
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	1%	Rp 950.040.972
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase dokumen pendukung pembangunan infrastruktur persampahan regional yang tersusun	20%	Rp 389.780.800
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	1%	Rp 400.000.000
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase dokumen pendukung pembangunan infrastruktur drainase regional dan daerah strategis provinsi yang tersusun	16,67%	Rp 2.390.723.300
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	31%	Rp 1.508.988.400
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang Tertangani	31%	Rp 7.986.178.821
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	0,46%	Rp 4.076.368.581

Tabel 2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp	34.512.512.664
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	82%	Rp	413.325.985
		Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	82%		
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	11,21%	Rp	12.592.606.707
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	34,02%	Rp	59.589.809.435
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah di Wilayah Provinsi yang Tersertifikasi	1%	Rp	163.796.000
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	1%	Rp	950.040.972
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase dokumen pendukung pembangunan infrastruktur persampahan regional yang tersusun	20%	Rp	389.780.800
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	1%	Rp	400.000.000
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase dokumen pendukung pembangunan infrastruktur drainase regional dan daerah strategis provinsi yang tersusun	16,67%	Rp	2.390.723.300
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	31%	Rp	1.508.988.400
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang Tertangani	31%	Rp	4.430.943.021
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	0,46%	Rp	4.076.368.581

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan indikator untuk menentukan tercapainya atau tidaknya pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Suatu perangkat daerah dapat dikatakan berhasil pada suatu program atau kegiatan apabila nilai capaian kinerjanya memenuhi target yang telah ditentukan.

Indikator kinerja yang dianalisis diuraikan menjadi 6 (enam) Indikator kinerja yang memiliki target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Indikator Kinerja yang dimaksud yaitu Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani, Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU, Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak, Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	11,21%	11,40%	101,69%	Sangat Tinggi	Bidang Pengembangan Permukiman
	Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	34,02%	49,37%	145,12%	Sangat Tinggi	Bidang Perumahan
Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	82%	100%	121,95%	Sangat Tinggi	Bidang Perumahan
Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	88,35%	87,23%	98,73%	Sangat Tinggi	Bidang Sarpras AMPLP (data BPS)
Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,62%	77,34%	95,93%	Sangat Tinggi	Bidang Sarpras AMPLP (data BPS)
Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	31%	30%	96,77%	Sangat Tinggi	Bidang PBL

Tabel diatas menunjukkan perbandingan Target dan Realisasi serta capaian per indikator kinerja tahun 2024. Sebagian besar Indikator Kinerja memiliki Capaian Kinerja yang sudah mencapai bahkan melebihi nilai 100%. Indikator Kinerja tersebut adalah Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani sebesar 101,69%, Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU sebesar 145,12%, Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni dengan capaian kinerja sebesar 121,95% dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sebesar 102,16%.

Namun, masih terdapat Indikator Kinerja dengan besaran capaian masih dibawah 100%. Indikator Kinerja tersebut adalah Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak sebesar 98,73%, dan Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani sebesar 96,77%.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	11%	11,18%	101,64%	11,21%	11,40%	101,69%	Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020
		Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	31%	35,68%	115,10%	34,02%	49,37%	145,12%	Indikator sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2020 dan UU. No 23 tahun 2014
2	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	80%	100%	125%	82%	100%	121,95%	Indikator Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Meningkatnya Capaian Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	86,91%	87,19%	100,32%	88,35%	87,23%	98,73%	Indikator ini diganti menjadi indikator baru sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020. Tapi indikator ini masih menjadi Indikator Kinerja Daerah atau IKD sehingga dalam perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut.
4	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	92,96%	80,54%	86,64%	80,62%	77,34%	95,93%	Indikator ini diganti menjadi indikator baru sesuai Permendagri No. 18 tahun 2020. Tapi indikator ini masih menjadi Indikator Kinerja Daerah atau IKD sehingga dalam perhitungan capaian menggunakan data dari BPS sebagai penanggung jawab dan DISPERKIM PROV SUMSEL sebagai pendukung dari indikator tersebut.
5	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	30%	30%	100%	31%	30,0%	96,77%	-

2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.1 Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.1, target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak tahun 2024 adalah 88,35% dengan realisasi sebesar 87,23% sehingga capaian kinerja sebesar 98,73%.

Untuk tahun 2023 dan tahun 2024 perbandingan target kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dapat dilihat pada Grafik 3.2.



Grafik 3.2 Perbandingan Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.2, target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak tahun 2023 adalah 86,91% serta tahun 2024 adalah 88,35%. Adapun realisasinya dapat dilihat pada Grafik 3.3.



Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.3, realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak tahun 2023 adalah 87,19%, kemudian pada tahun 2024 realisasinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 87,23%. Dalam hal ini realisasi pada 2 (dua) tahun tersebut mengalami peningkatan karena banyak rumah tangga dalam keperluan sehari-hari yang menggunakan air yang bersumber dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Adapun capaiannya dapat dilihat pada Grafik 3.4.



Grafik 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.4, capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak tahun 2023 adalah 100,32%, kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 98,73%. Hal tersebut karena karena dampak dari penggunaan air yang bersumber dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air

terlindung. Dalam hal ini realisasi capaian pada tahun 2024 didapatkan secara konkuren dari kabupaten/kota yang menunjukkan hasil persentase cakupan akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota yang terlayani. Sehingga, capaian indikator Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak mengalami penurunan dari tahun 2023. Solusi yang akan dilakukan dalam peningkatan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak adalah melakukan pembangunan fasilitas distribusi air minum sehingga akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota dapat terlayani. Adapun indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di-dukung dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

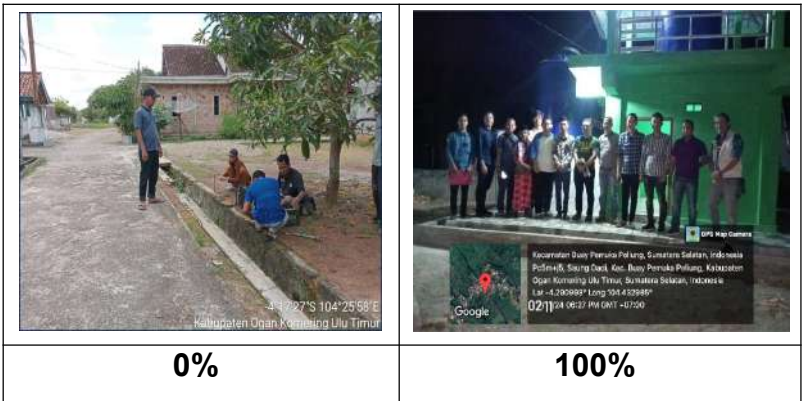
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2024 dapat dijabarkan pada uraian sebagai berikut:

- Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Kab. OKI
- Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Kab. OKUT

Gambar 3.1 merupakan beberapa gambar yang diambil dalam kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan kegiatan penunjang Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Tahun 2024.



Gambar 3.1 Foto Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Kab. OKI



Gambar 3.2 Foto Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Kab. OKUT



Gambar 3.3 Foto Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Kab. OKUT

Gambar diatas menunjukkan progres Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Kab. OKI, dan Perencanaan Pembangunan Sumur Bor Kab. OKUT.

Adapun target Persentase Cakupan Akses Air Minum Layak pada akhir periode RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 adalah sebesar 90,35%. Sampai tahun 2024 sudah 54 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan persentase realisasi fisik kegiatan masing-masing sebesar 100% sehingga cakupan akses air minum mencapai 87,23%. Artinya, persentase capaian pada RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 sejauh ini adalah sebesar 96,55%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara target akhir periode RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 terhadap realisasi sampai dengan sekarang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.5 Kondisi Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak RPD 2024-2026 Provinsi Sumatera Selatan

Grafik diatas menunjukkan kondisi kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak sekarang terhadap target kondisi kinerja akhir RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2024. Untuk mencapai target kinerja di akhir periode RPD 2024-2026, perlu adanya analisis pemetaan kebutuhan air minum yang

terbaru agar kegiatan penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.

Target nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dimana target yang harus dipenuhi pada akhir periode RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dimana pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha (Sumber: RPJMN 2020-2024). Adapun kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung tercapainya target tersebut sampai tahun 2024 adalah sebesar 87,23% dengan rincian kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya.

Pada indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak target, realisasi dan capaian tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.6 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dengan target 80,62%, maka realisasinya adalah 77,34% dengan capaian sebesar 95,93%.

Selanjutnya, untuk perbandingan target Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.9 dibawah.



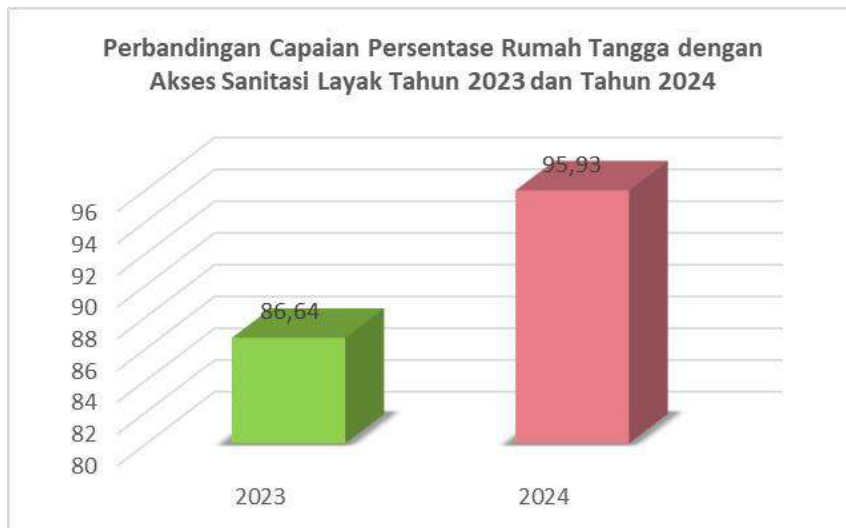
Grafik 3.7 Perbandingan Target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.7 target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2023 adalah 92,96% dan target tahun 2024 adalah 80,62%. Adapun realisasinya dapat dilihat pada Grafik 3.8



Grafik 3.8 Perbandingan Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.8 realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2023 adalah 80,54%, kemudian pada tahun 2024 realisasi mengalami penurunan sebesar 77,34%. Hal ini merepresentasikan bahwa cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk masih belum memenuhi target yang telah ditentukan dan tiap rumah tangga masih ada yang belum memiliki fasilitas buang air besar (BAB) yang digunakan secara pribadi atau bersama dengan rumah tangga tertentu (terbatas). Adapun capaiannya dapat dilihat pada Grafik 3.9



Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.9 capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak tahun 2023 adalah 86,64%, kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian persentase yaitu 95,93%. Adapun data realisasi yang didapat secara konkuren dari kabupaten/kota berdasarkan realisasi tahun 2024 menunjukkan penurunan persentase akses sanitasi layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) yang terlayani. Hal ini merepresentasikan cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk masih belum memenuhi target yang telah ditentukan dan tiap rumah tangga masih ada yang belum memiliki fasilitas buang air besar (BAB) yang digunakan secara pribadi atau bersama dengan rumah tangga tertentu (terbatas). Masih terdapat 10 kab/kota dari 17 kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang tingkat pelayanan sanitasinya masih dibawah 80%. 10 kab/kota yang dimaksud adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan tingkat pelayanan sebesar 65,54%, Kabupaten Lahat sebesar 69,27%, Kabupaten Musi Rawas sebesar 70,98%, Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 79,03%, Kabupaten Banyuasin sebesar 61,51%, Kabupaten OKUS sebesar 59,80%, Kabupaten Ogan Ilir sebesar 75,12%, Kabupaten Empat Lawang sebesar 39,84%, Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 69,95% dan Kota Pagar Alam sebesar 53,94%. Dalam meningkatkan persentase capaian, hal yang akan dilakukan adalah dengan memperkuat sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota untuk ikut andil mendukung meningkatkan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di 10 kab/kota dimana 10 kabupaten/kota tersebut untuk pencapaiannya masih di bawah 80% serta menganggarkan kegiatan berupa Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yaitu Pembangunan Drainase Kota Muaradua Kab. Oku Selatan, dengan harapan pembangunan dapat dilakukan dengan cepat dan terukur di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga solusi lain yang akan dilakukan adalah adanya kerjasama yang

konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam penanganan sanitasi. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak didukung dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Adapun target Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak pada akhir periode RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 adalah sebesar 82,62%. Sampai tahun 2024 sudah 1 kegiatan yang telah dilaksanakan dengan persentase realisasi fisik kegiatan sebesar 100% sehingga realisasi rumah tangga dengan akses sanitasi layak mencapai 77,34%. Artinya, persentase capaian pada RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 sejauh ini adalah sebesar 93,61%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara target akhir periode RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 terhadap realisasi sampai dengan sekarang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.10 Kondisi Kinerja Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak RPD 2024-2026 Provinsi Sumatera Selatan

Grafik diatas menunjukkan kondisi kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak sekarang terhadap target kondisi kinerja akhir RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023-2024. Untuk mencapai target akhir periode RPJMD 2024-2026, perlu ditingkatkan kegiatan penyelenggaraan akses sanitasi layak baik secara kuantitas dan kualitas kedepannya.

Target nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman pada tahun 2024 adalah sebesar 90% dimana target yang harus dikejar pada tahun 2024 adalah sebesar 90,00%. Proyek prioritas strategis yang diselenggarakan pemerintah pusat untuk mencapai target tersebut adalah Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga). Manfaat

dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat (Sumber: RPJMN 2020-2024). Adapun kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung proyek prioritas strategis tersebut yaitu sebesar 77,34% sampai tahun 2024 dengan rincian kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berikut ini merupakan beberapa gambar yang diambil pada Kegiatan Pembangunan Drainase Kota Muara Dua Kab. Oku Selatan sebagai kegiatan yang menunjang peningkatan Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di tahun 2024.



Gambar 3.4 Foto Kegiatan Pembangunan Drainase Kota Muara Dua Kab. Oku Selatan

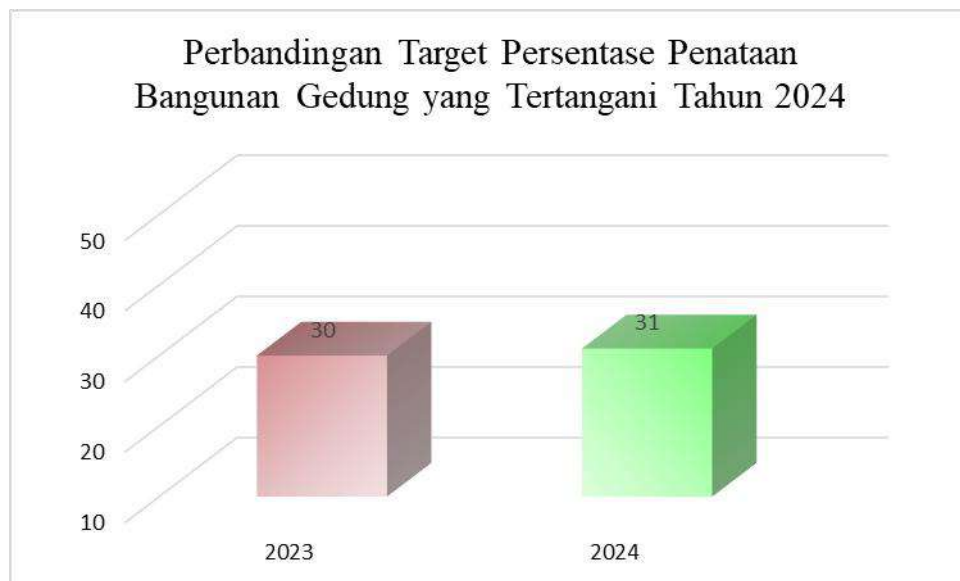
Gambar diatas menunjukkan progres Kegiatan Pembangunan Drainase Kota Muaradua Kab. Oku Selatan.

Kinerja Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.11 Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani Tahun 2024

Adapun target untuk indikator Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani pada tahun 2024 adalah 31%. Untuk perbandingan target tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.12 Perbandingan Target Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani Tahun 2023 dan Tahun 2024

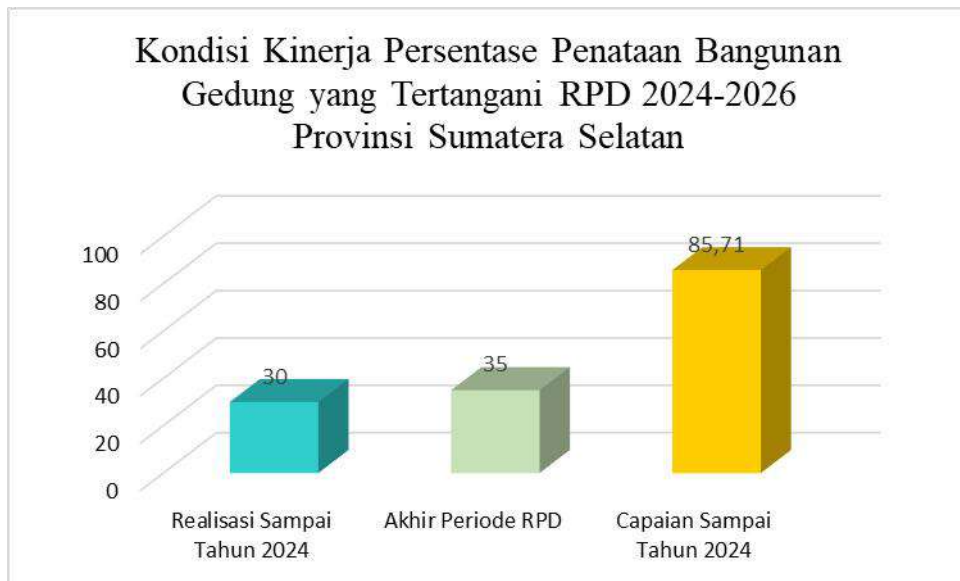
Adapun perbandingan realisasi dari kedua indikator tersebut dapat dilihat pada grafik 3.13



Grafik 3.13 Perbandingan Realisasi Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.13 realisasi Perbandingan Realisasi Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani tahun 2023 adalah 30%, kemudian pada tahun 2024 realisasinya sama seperti tahun sebelumnya yaitu 30%. Hal ini karena kegiatan yang dilaksanakan bukan merupakan pembangunan fisik. Adapun capaiannya dapat dilihat pada Grafik 3.13

Untuk perbandingan realisasi tahun 2024 indikator ini sebesar 30% dan pada target akhir periode RPD sebesar 35%. Artinya persentase capaian pada akhir periode RPD sebesar 85,71%.



Grafik 3.14 Kinerja Realisasi Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani RPD 2024-2026 Provinsi Sumatera Selatan

Adapun perbandingan capaian persentase dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 3.15 Perbandingan Capaian Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.15 capaian Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani tahun 2023 adalah 100%, kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian persentase yaitu 96,77%. Penurunan capaian ini dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat kegiatan pembangunan fisik. Solusi yang akan dilakukan adalah melakukan pembangunan, rehabilitasi, renovasi maupun ubahsuai terhadap bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.

Kinerja Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.16 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, Realisasi Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani sebesar 11,40%. Adapun target untuk indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani pada tahun 2024 adalah 11,21%. Sehingga capaian adalah 101,69%. Untuk perbandingan target tahun 2023 dan tahun 2024, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.17 Perbandingan Target Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Tahun 2023 dan Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi indikator tersebut di tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 3.18



Grafik 3.18 Perbandingan Realisasi Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.18, realisasi Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani tahun 2023 adalah 11,18%, dan tahun 2024 realisasinya sebesar 11,40%. Di tahun 2024 realisasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

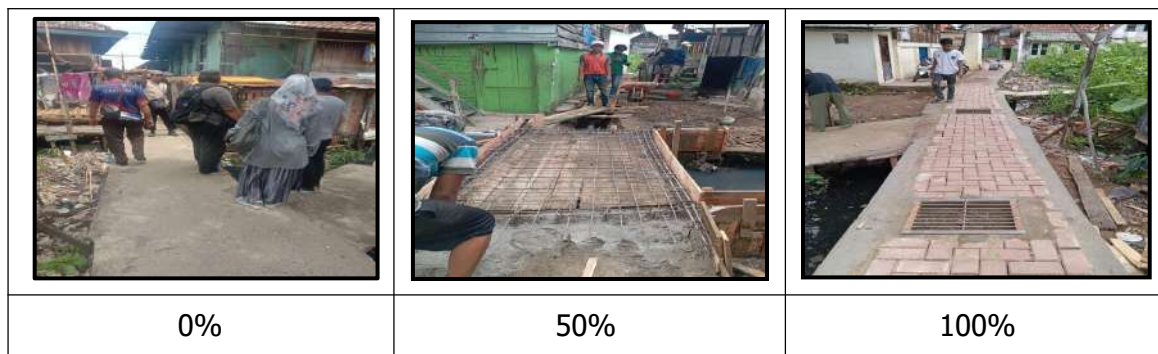
Untuk perbandingan capaian Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.19 Perbandingan Capaian Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan Grafik 3.19 capaian Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani tahun 2023 adalah 101,64%, kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan capaian persentase yaitu 101,69%. Hal ini dikarenakan kegiatan berjalan sesuai dengan titik lokasi yang tercantum di SK Kumuh Kabupaten/Kota dan telah dilakukannya kerjasama CSR terkait pemenuhan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Adapun kegiatan yang mendukung indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani yaitu Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha.

Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar dibawah adalah dokumentasi kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Jalan Lingkungan dan Drainase Permukiman Kumuh Kel. 29 Ilir Kec. Ilir Barat II Kota Palembang :



Gambar 3.5 Foto Kegiatan indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani

Adapun perbandingan realisasi tahun 2024 pada target akhir RPD dapat dilihat dalam grafik berikut.



Grafik 3.20 Kondisi Kinerja Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani RPD 2024-2026

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi 2024 yaitu sebesar 11,40% dan telah mendapat capaian sebesar 97,94% dari target akhir RPD 11,64%.

Selanjutnya kinerja Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.21 Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada Tahun 2024

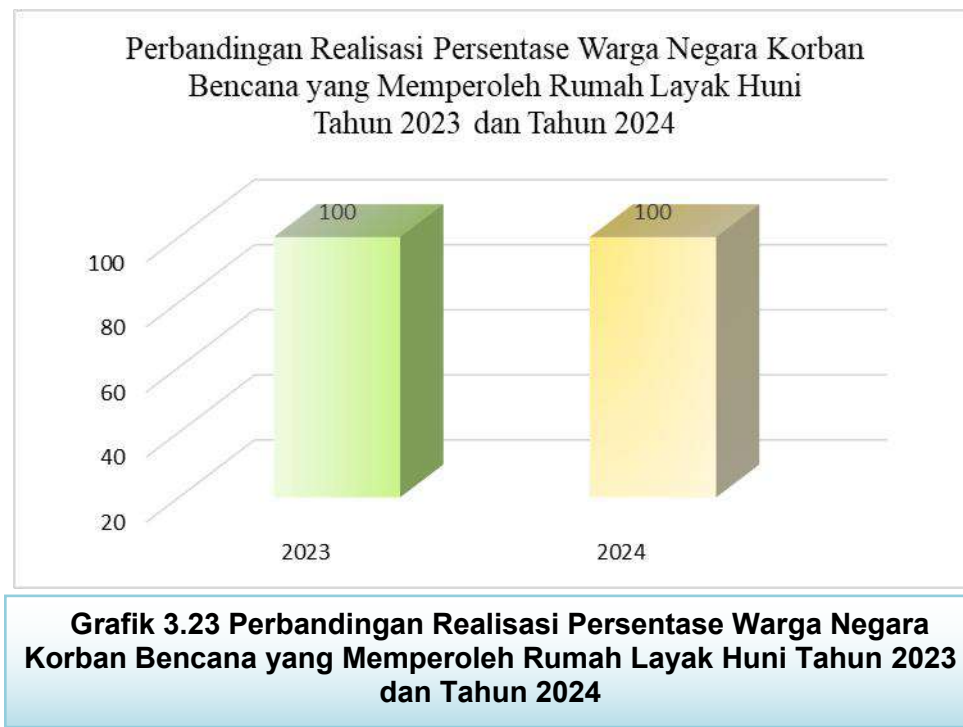
Berdasarkan grafik di atas, target untuk indikator Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni pada tahun 2024 adalah 82%. Realisasi pada tahun 2024 sebesar 100% dengan capaian sebesar 121,95%.

Adapun perbandingan target Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Grafik 3.22 Perbandingan Target Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat perbandingan target pada tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu sebesar 80% dan 82%. Untuk Perbandingan realisasi dapat dilihat pada grafik berikut.



Berdasarkan grafik tersebut realisasi Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni tahun 2023 adalah 100%, kemudian pada tahun 2024 realisasinya sama seperti tahun sebelumnya yaitu 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 tidak terjadi bencana yang mengakibatkan dampak di 2 kabupaten/kota atau lebih yang ditetapkan menjadi bencana Provinsi akan tetapi pada tahun 2024 telah melakukan identifikasi/pendataan pada kawasan rawan bencana dan terdapat kegiatan yang mendukung indikator tersebut dimana yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Adapun kegiatan yang mendukung indikator Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni adalah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi serta Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi. Adapun perbandingan capaian pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.24 Perbandingan Capaian Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, capaian yang didapat pada tahun 2023 sebesar 125% dan tahun 2024 sebesar 121,95%. Untuk realisasi 2024 pada akhir RPD dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.25 Perbandingan Capaian Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan grafik tersebut, realisasi sampai tahun 2024 sebesar 100% dengan target akhir RPD sebesar 85%. Sehingga capaian yang didapat adalah 117,65%.

Selanjutnya untuk indikator Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.26 Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa target Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2024 sebesar 34,02% dengan realisasi sebesar 49,37% serta capaian sebesar 145,12%. Untuk perbandingan target antara tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut.



Grafik 3.27 Perbandingan Target Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2023 dan Tahun 2024

Untuk perbandingan realisasi tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat dibawah ini.



Grafik 3.28 Perbandingan Realisasi Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan grafik tersebut realisasi Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU tahun 2023 adalah 35,68%, dan pada tahun 2024 realisasi mengalami peningkatan yaitu sebesar 49,37%. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan terdapat peran aktif dari masyarakat yang mengusulkan kegiatan PSU tersebut sehingga pembangunan PSU tersebut dapat terlaksana sesuai dengan proposal dari masyarakat. Adapun perbandingan capaian pada tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.29 Perbandingan Capaian Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Tahun 2023 dan Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat capaian tahun 2023 sebesar 115,10% dan tahun 2024 sebesar 145,12%. Adapun untuk perbandingan realisasi pada akhir RPD 2024-2026 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.30 Kinerja Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU Pada Akhir RPD 2024-2026 Provinsi Sumatera Selatan

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pada tahun 2024 sebesar 49,37% dari target akhir RPD sebesar 38,17% sehingga capaian sampai tahun 2024 sebesar 129,34%.

Dokumentasi kegiatan untuk indikator Persentase Satuan Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar dibawah adalah dokumentasi kegiatan Penyediaan PSU Permukiman Kec. Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir :



Gambar 3.6 Foto Kegiatan indikator Persentase Satuan Permukiman Yang Sudah Dilengkapi PSU

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026

Pengukuran dan perbandingan realisasi kinerja serta tingkat capaian kinerja selama 1 tahun terakhir masa Renstra ditunjukkan pada Tabel 3.4 yang merupakan kemajuan capaian sasaran strategis.

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	11,40%	11,64%	97,94
		Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	49,37%	38,17%	129,34
2	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	85%	117,65
3	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	87,23%	90,35%	96,55
4	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	77,34%	82,62%	93,61
5	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	30%	35,0%	85,71

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja instansi adalah membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional. Adapun data perbandingan yang disajikan adalah perbandingan capaian kinerja dari Pemerintah Pusat terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Penyandingan realisasi kinerja tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6 = 4/5 \times 100$
1	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	87,23%	100%	87,23%
2	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	77,34%	90%	85,93%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternative Solusi

Analisis penyebab keberhasilan kinerja pada tahun 2024 dibagi menjadi empat indikator kinerja yang memiliki nilai kinerja indikator 100% atau keatas. Empat indikator kinerja tersebut adalah Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani, Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU, Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak.

Adapun analisis penyebab kegagalan kinerja pada tahun 2024 dibagi menjadi dua indikator kinerja yang memiliki nilai kinerja dibawah 100%. Dua indikator kinerja tersebut adalah Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani.

Penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusi pada indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	11,21%	11,40%	101,69%	Realisasi capaian telah mencapai target. Hal ini dikarenakan kegiatan berjalan sesuai dengan titik lokasi yang tercantum di SK Kumuh Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan yang mendukung indikator Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani yaitu Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kegiatan berjalan sesuai dengan titik lokasi yang tercantum di SK Kumuh Kabupaten/Kota dan telah dilakukannya kerjasama CSR terkait pemenuhan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
		Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	34,02%	49,37%	145,12%	Realisasi capaian telah mencapai target. Hal ini dikarenakan dampak dari pembangunan fasilitas PSU yang telah dibangun di tahun tersebut.	Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat peran aktif dari masyarakat yang mengusulkan kegiatan PSU tersebut sehingga pembangunan PSU tersebut dapat terlaksana sesuai dengan proposal dari masyarakat
2	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	82%	100%	121,95%	1. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana yang menjadi kewenangan provinsi yaitu apabila bencana tersebut berdampak pada dua kabupaten atau lebih dan Status Bencana ditetapkan oleh SK Kepala Daerah sebagai bencana provinsi; 2. Kondisi dan letak geografis Sumatera Selatan yang bukan merupakan daerah rawan bencana alam sehingga apabila terjadi bencana tidak berdampak pada lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota dan tidak ditetapkan sebagai bencana provinsi. 3. Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman sudah menganggarkan kegiatan terkait Pendataan dan Penyediaan Relokasi Rumah akibat terjadinya bencana, sesuai dengan arahan Kemendagri apabila OPD telah menganggarkan namun tidak terjadi bencana maka capaian di anggar 100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan identifikasi/pendataan pada kawasan rawan bencana
3	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	88,35%	87,23%	98,73%	Realisasi pada indikator belum mencapai target karena dampak dari penggunaan air yang bersumber dari air leding, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Dalam hal ini realisasi capaian pada tahun 2024 didapatkan secara konkuren dari kabupaten/kota yang menunjukkan hasil persentase cakupan akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota yang terlayani.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pembangunan fasilitas distribusi air minum sehingga akses air minum layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten/Kota dapat terlayani
4	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	88,35%	77,34%	87,54%	Realisasi pada indikator belum mencapai target karena data realisasi yang didapat secara konkuren dari kabupaten/kota menunjukkan penurunan persentase akses sanitasi layak pada jumlah KK (Kepala Keluarga) yang terlayani. Hal ini merepresentasikan cakupan pelayanan akses sistem air limbah ke rumah-rumah penduduk belum memenuhi target yang telah ditentukan, sebagai dampak masih terdapat 10 kab/kota dari 17 kab/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang tingkat pelayanan sanitasinya masih dibawah 80%.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pembangunan drainase serta adanya kerjasama yang konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam penanganan sanitasi
5	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	31%	30%	96,77%	Realisasi pada indikator belum mencapai target karena kegiatan yang dilaksanakan bukan pembangunan fisik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pembangunan, rehabilitasi, renovasi maupun ubahsui terhadap bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain keberhasilan dan kegagalan pada indikator, terdapat juga analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	11,40%	Program Kawasan Permukiman / Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha yang ditingkatkan	100%	Menunjang
		Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	49,37%	Program Pengembangan PSU / Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang terselenggara	100%	Menunjang
2	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	Program Pengembangan Perumahan / Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun / terehabilitasi	100%	Menunjang
3	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	87,23%	Untuk data capaian, bekerja sama dengan BPS sebagai penanggung jawab. Sedangkan DISPERKIM Prov. SumSel hanya sebagai pendukung	-	98,73%	-
4	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	77,34%	Untuk data capaian, bekerja sama dengan BPS sebagai penanggung jawab. Sedangkan DISPERKIM Prov. SumSel hanya sebagai pendukung	-	95,93%	-
5	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	30%	Program Penataan Bangunan Gedung / Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah terselenggara	100%	Menunjang

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran berdasarkan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja					Anggaran			
No.	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	11,21%	11,40%	101,69	Rp 12.592.606.707	Rp 11.587.173.512	92,02	7,98
		34,02%	49,37%	145,12	Rp 59.589.809.435	Rp 56.645.311.000	95,06	4,94
2	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	82%	100%	121,95	Rp 413.325.985	Rp 401.353.185	97,10	2,90
3	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	88,35%	87,23%	98,73	Rp 950.040.972	Rp 845.044.217	88,95	11,05
4	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	80,62%	82,36%	102,16	Rp 400.000.000	Rp 341.644.894	85,41	14,59
5	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	31%	30%	96,77	Rp 1.508.988.400	Rp 1.452.678.400	96,27	3,73

Untuk pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja					Anggaran			
No.	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	100%	Rp 34.512.512.664	Rp 30.574.306.512	88,59	11,41
2	Program Kawasan Permukiman	11,21%	11,40%	101,69%	Rp 12.592.606.707	Rp 11.587.173.512	92,02	7,98
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	34,02%	49,37%	145,12%	Rp 59.589.809.435	Rp 56.645.311.000	95,06	4,94
4	Program Pengembangan Perumahan	82%	100%	121,95%	Rp 413.325.985	Rp 401.353.185	97,10	2,90
		82%	100%	121,95%				
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1%	1%	100%	Rp 163.796.000	Rp 146.087.700	89,19	10,81
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	88,35%	87,23%	98,73%	Rp 950.040.972	Rp 845.044.217	88,95	11,05
		1%	1%	100,00%				
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	80,62%	82,36%	102,16%	Rp 400.000.000	Rp 341.644.894	85,41	14,59
		1%	1%	100,00%				

Indikator Kinerja					Anggaran			
No.	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
8	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	20%	20%	100,00%	Rp 389.780.800	Rp 365.860.540	93,86	6,14
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	16,67%	16,67%	100,00%	Rp 2.390.723.300	Rp 2.325.209.440	97,26	2,74
10	Program Penataan Bangunan Gedung	31%	30%	96,77%	Rp 1.508.988.400	Rp 1.452.678.400	96,27	3,73
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	31%	30%	96,77%	Rp 4.430.943.021	Rp 3.760.589.934	84,87	15,13
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	0,46%	1,54%	334,78%	Rp 4.076.368.581	Rp 3.695.719.449	90,66	9,34

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka terselenggaranya program yang mendukung indikator kinerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efisiensi Penggunaan Sumber Daya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Adapun persentase efisiensi biaya program yang mendukung indikator kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.10

Tabel 3.10 Persentase Efisiensi Biaya Program yang Mendukung Indikator Kinerja Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 34.512.512.664	Rp 30.574.306.512	88,59
2	Program Kawasan Permukiman	Rp 12.592.606.707	Rp 11.587.173.512	92,02
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp 59.589.809.435	Rp 56.645.311.000	95,06
4	Program Pengembangan Perumahan	Rp 413.325.985	Rp 401.353.185	97,10
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp 163.796.000	Rp 146.087.700	89,19
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 950.040.972	Rp 845.044.217	88,95
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 400.000.000	Rp 341.644.894	85,41
8	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 389.780.800	Rp 365.860.540	93,86
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 2.390.723.300	Rp 2.325.209.440	97,26
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 1.508.988.400	Rp 1.452.678.400	96,27
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp 4.430.943.021	Rp 3.760.589.934	84,87
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 4.076.368.581	Rp 3.695.719.449	90,66

Berdasarkan Tabel 3.10 realisasi biaya untuk keseluruhan program pada tahun 2024 sebesar Rp. 112.140.978.783,- adapun target biaya adalah Rp. 121.418.895.865,-. Dengan rumus efisiensi diatas, didapat efisiensi keseluruhan program pada tahun 2024 sebesar 8,40%. Persentase efisiensi ini tergolong sedang sehingga bisa diasumsikan secara umum penggunaan sumber daya biaya dapat terefisiensi cukup baik.

Adapun dilihat dari level setiap program, program yang memiliki efisiensi sumber daya paling besar adalah Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan efisiensi sebesar 15,13%. Hal ini dikarenakan program tersebut dimunculkan untuk menunjang kegiatan penataan bangunan dan lingkungan. Adapun untuk program-program lainnya, efisiensi dapat dilakukan melalui pelibatan multipihak dalam pelaksanaan kegiatan seperti pelibatan pihak ke-3, kerja sama dengan perguruan tinggi, instansi vertikal, pihak swasta atau lembaga terkait dalam penggunaan tenaga ahli, tim penilai, narasumber serta dalam pembantuan pelaksanaan kegiatan. Efisiensi juga dilakukan dengan penggunaan sarana dan prasarana penunjang kerja secukupnya.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2024 adalah sebanyak 12 Program dan 25 Kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini:

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 950.040.972,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 845.044.217,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,95% yang diarahkan untuk menerapkan lingkungan yang sehat pada permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 18 lembaga, Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun sebanyak 2 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 4 (empat) kab/kota.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 341.644.894,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 85,41%, yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai

adalah Jumlah Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun sebanyak 2 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebanyak 7 Kabupaten/Kota.

3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 389.780.800,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 365.860.540,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,86%. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan sebanyak 7 kabupaten/kota, Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan sebanyak 7 kabupaten/kota.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.390.723.300,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.325.209.440,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,26%. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan sebanyak 2 unit, Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Tersusun sebanyak 1 dokumen.

5) Program Penataan Bangunan Gedung

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.508.988.400,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.452.678.400,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,27%, yang diarahkan untuk menata bangunan gedung dan aset di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang sebanyak 10 lisensi, Jumlah Dokumen Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi sebanyak 2 dokumen,

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.430.943.021,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.760.589.934,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 84,87%, yang diarahkan untuk menata bangunan dan lingkungan strategis dan aset provinsi di Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang

Ditata sebanyak 3 kawasan, Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun sebanyak 8 dokumen, Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebanyak 2 dokumen, Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan sebanyak 17 kabupaten/kota.

7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.076.368.581,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.695.719.449,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,66%, yang diarahkan untuk mengembangkan jasa konstruksi di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan sebanyak 15 orang, Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih sebanyak 160 orang, Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 2 lembaga, Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi sebanyak 40 orang, Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya sebanyak 2 lembaga, Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan sebanyak 1 layanan informasi, Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan sebanyak 1 perangkat pendukung, Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 3 orang, Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha sebanyak 2 badan usaha, Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun sebanyak 1 dokumen.

8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 34.512.512.664,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 30.574.306.512,- dengan realisasi fisik sebesar 98,91% dan realisasi keuangan sebesar 88,59%, yang diarahkan untuk administrasi perkantoran dalam mendukung terselenggaranya urusan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebanyak 2 dokumen;

Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah perubahan DPA-SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 dokumen; Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 2 laporan; Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 1 laporan; Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan sebanyak 115 orang; Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 laporan; Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan sebanyak 1 dokumen; Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang dikoordinasi dan disusun sebanyak 1 laporan; Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD sebanyak 1 dokumen; Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan; Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan sebanyak 1 paket; Jumlah administrasi kepegawaian yang didata dan diolah sebanyak 1 dokumen; Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikoordinasi dan dilaksanakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang dididik dan dilatih sebanyak 6 orang; Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket; Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket; Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 1 paket; Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket; Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 1 dokumen; Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu sebanyak 1 laporan; Jumlah dokumen rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan sebanyak 1 laporan; Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinasmis pada SKPD sebanyak 1 dokumen; Jumlah dokumen pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang didukung sebanyak 1 dokumen; Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan sebanyak 4 unit roda 4, 2 unit roda 2; Jumlah mebel yang diadakan sebanyak 1 paket; Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sebanyak 2 unit sarpras gedung; Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 1 laporan; Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 1 laporan; Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 1 laporan; Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan

sebanyak 18 unit roda empat dan 3 unit roda dua; Jumlah mebel yang dipelihara sebanyak 1 unit; Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 gedung; Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan sebanyak 1 unit kerja.

9) Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 413.325.985,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 401.353.185,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,10%, yang diarahkan untuk melaksanakan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah sebanyak 1 dokumen, Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan sebanyak 1 dokumen, Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan sebanyak 15 orang, Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi sebanyak 6 unit rumah, Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun sebanyak 8 unit rumah.

10) Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.592.606.707,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 11.587.173.512,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 92,02%, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan utilitas umum di kawasan kumuh di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi sebanyak 1 dokumen, Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina sebanyak 7 kelompok masyarakat, Jumlah laporan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebanyak 1 laporan, Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh sebanyak 45 orang, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebanyak 1 laporan, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan

Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebanyak 1 laporan, Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar seluas 1628,58 Ha.

11) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 59.589.809.435,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 56.645.311.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,06%, yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan PSU di kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman sebanyak 1 dokumen, Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman sebanyak 20 lokasi, Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman sebanyak 1 laporan.

12) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 163.796.000,- dan realisasi anggaran mencapai Rp. 146.087.700,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,19%. Hasil yang dicapai adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah sebanyak 1 laporan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Anggaran terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pagu anggaran dan realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Triwulan IV ini	Realisasi s.d. Triwulan IV ini	Target s.d. Akhir Tahun	Realisasi s.d. Triwulan IV ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	121.418.895.865	112.140.978.783	100	92,36	100	99,69
Belanja Operasi	110.080.519.920	101.309.248.253	100	92,03	100	
Belanja Modal	11.338.375.945	10.831.730.530	100	95,53	100	

Tabel 3.5 menunjukkan Realisasi Keuangan Belanja Operasi untuk tahun 2024 sebesar 92,03%. Realisasi keuangan belanja operasi tidak mencapai 100% karena terdapat kegiatan fisik yang terutang dari pihak ke-3 yang disebabkan oleh keterlambatan proses lelang. Untuk Belanja Modal, Realisasi Keuangannya sebesar 95,53%. Realisasi keuangan belum mencapai 100% dikarenakan pihak ketiga belum melakukan penagihan. Adapun untuk realisasi fisik belum mencapai 100% dikarenakan terdapat rincian kegiatan yang tidak dapat diselesaikan, yakni Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan Pemeliharaan Mebel, sehingga kegiatan sedikit terhambat. Jadi, Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebesar 92,36% dengan Realisasi Fisik sebesar 99,69%.

Uraian rinci mengenai realisasi pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Total Belanja

Realisasi keuangan Total Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 112.140.978.783,- atau 92,36% dan realisasi fisik 99,69%.

2. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi keuangan Belanja Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 101.309.248.253,-.

3. Realisasi Belanja Modal

Realisasi keuangan Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 10.831.730.530,-.

Adapun realisasi keuangan program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12 Realisasi Keuangan Program/Kegiatan APBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tujuan	Sasaran		Program	Pagu Anggaran	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akses Terhadap Infrastruktur Dasar	1.1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	12.592.606.707	92,02	11.587.173.512
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	59.589.809.435	95,06	56.645.311.000
		2.1	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Program Pengembangan Perumahan	413.325.985	97,10	401.353.185
		3.1	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	950.040.972	88,95	845.044.217
		4.1	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	389.780.800	93,86	365.860.540
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	400.000.000	85,41	341.644.894
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.390.723.300	97,26	2.325.209.440
		5.1	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	Program Penataan Bangunan Gedung	1.508.988.400	96,27	1.452.678.400
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	4.430.943.021	84,87	3.760.589.934
		6.1	Meningkatnya Kuantitas/Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih yang Berstandar Teknis	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	4.076.368.581	90,66	3.695.719.449
		7.1	Meningkatnya Jumlah Pengembang Perumahan yang Tersertifikasi	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	163.796.000	89,19	146.087.700
		8.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penatausahaan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	34.512.512.664	88,59	30.574.306.512

BAB IV

PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menindak lanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah.

Bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024–2026 dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan bekal keikhlasan, tekad dan kerja keras serta rasa kebersamaan dari berbagai pihak yang terkait akan mampu memenuhi pencapaian sasaran kinerja yang lebih baik lagi dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dibidang keciptakaryaan.

Akhirnya dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dimasa mendatang.

Palembang, Januari 2025

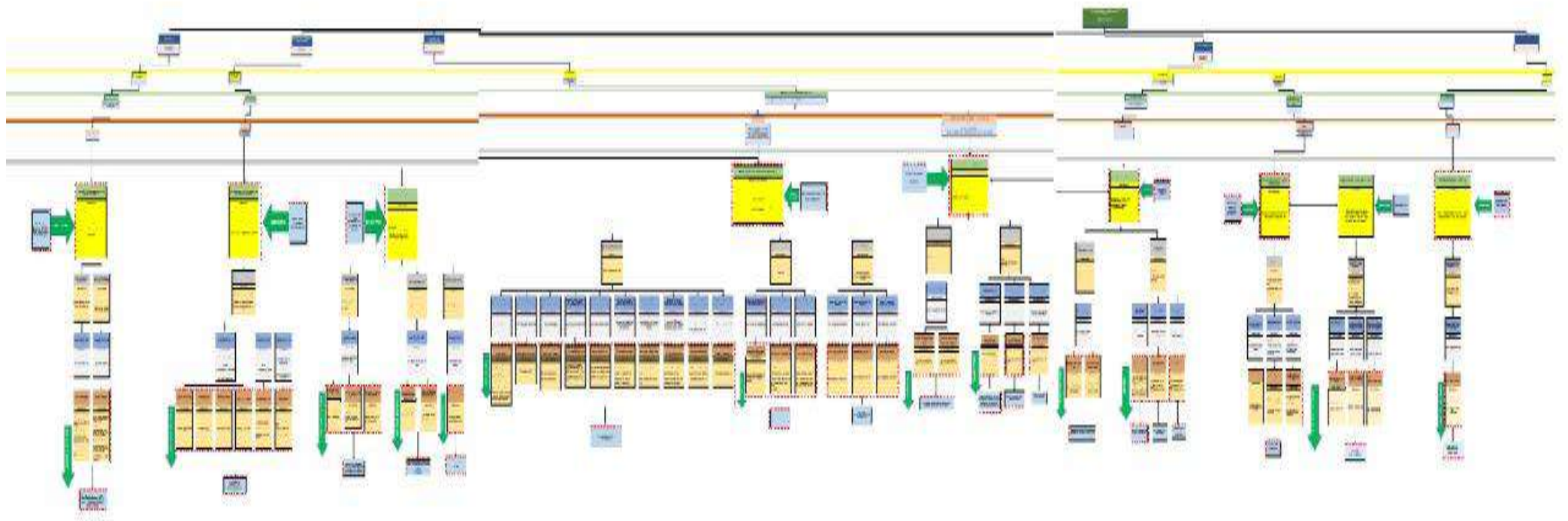
Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



Ir. H. Novian Aswardani, ST., M.M., IPM., ASEAN.Eng

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

LAMPIRAN 1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN 2

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. SUMSEL
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
IR. H. Nofian Aswardani, ST., MM, IPM, ASEAN ENG
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19751125 199803 1 004

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 66 TAHUN 2016
TANGGAL : 04 JULI 2024

SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROV. SUMSEL

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL AHLI Madya

Dr. H. Muhammad Senen Har, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19671016 198509 1 001

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
ERISA SUSANTI, ST., M.Si
Pembina, IV/a NIP. 19790606 200903 2 008

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
PAJRIANSAH, SE, M.Si
Pembina, IV/a NIP. 19730912 200312 1 003

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
MAULIDA JUSTISIA, SE., MM
Penata Tk.I, IIId NIP. 19820106 200801 2 003

KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA AIR MINUM DAN
PENYEKUTAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
M. SAIFUL ISLAM, S.T., M.T.
Pembina Tk.I, IV/b NIP. 19751127 199803 1 004

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN
AHMAD WAHIDU, S.T., M.T.
Pembina, IV/a NIP. 19800703 200212 1 001

PL.H. KEPALA BIDANG PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
EDI GARIBALDI EDB, ST
Penata Tk.I, IIId NIP. 19681204 196903 1 003

KEPALA BIDANG PERUMAHAN
ZULKARNAEN, SP., MM
Pembina, IV/a NIP. 19741113 200701 1 004

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN AMPL
HABIBULLAH, ST
Penata Tk.I, IIId NIP. 19750904 200701 1 001

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
IR. OCTARIANTO, ST., M.Si
Penata Tk.I, IIId NIP. 19811005 200801 1 003

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
EDI GARIBALDI EDB, ST
Penata Tk.I, IIId NIP. 19681204 196903 1 003

KEPALA SEKSI PENYIAPAN DATA PERUMAHAN
GANDHI INDRA PERMANA, ST.
Penata Tk.I, IIId NIP. 19890122 201101 1 001

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SARANA
PENGELOLAAN AIR MINUM
MUSTIKA FEBRIANTI MARJANA, S.T.
Penata Tk.I, IIId NIP. 19750225 199803 2 003

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN
H. DESEN PULPA, ST
Penata Tk.I, IIId NIP. 19810612 201101 1 003

KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN
AHMAD ZUL KARNAIN, ST., M.T. MURP.
Penata Tk.I, IIId NIP. 19640505 200902 1 005

KEPALA SEKSI PENYULUHAN PERUMAHAN
FERRY ARIANDI, ST., M.Si
Penata Tk.I, IIId NIP. 19760105 201001 1 006

KEPALA SEKSI PENYEKUTAN LINGKUNGAN
PERMUKIMAN
AMYUDARSYAH, S.T., M.T.
Pembina, IV/a NIP. 19820939 200803 1 002

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERDESAAN
RAFIKA DEVI, ST., MT
Pembina, IV/a NIP. 19770420 201101 2 004

KEPALA SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN
KAWASAN
ANGGA SENA GAUTAMA, S.T., M.T.
Penata Tk.I, IIId NIP. 19850213 201101 1 002

KEPALA SEKSI PENYEDIAAN PERUMAHAN
YUDISTIRA MUHSIN, ST., MT
Pembina, IV/a NIP. 19790308 200804 1 008

KEPALA UPTD PUSAT INFORMASI
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
(PIP2B) DAN JASA KONSTRUKSI
MUALIMAH GUSTINI, ST., M.Si
Pembina, IV/a NIP. 19740808 199803 2 005

KEPALA SUB BAGIAN TU UPTD PUSAT INFORMASI
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN & JAKON
GLADESTA ALNANDA, SE
Penata, II/c NIP. 19770420 201101 1 004

KEPALA SEKSI PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN UPTD PUSAT INFORMASI
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN, DAN JAKON
M. SYAZARI YAZUAR, S.T., M.Si., M.T.
Pembina IV/a NIP. 119820106 200212 1 001

KEPALA SEKSI JASA KONSTRUKSI
UPTD PUSAT INFORMASI
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN & JAKON
BUDI INDAH HAPSARI, ST., MT
Pembina, IV/a NIP. 19820419 201101 2 005

